

GERAKAN SEPARATIS SUDAN'S PEOPLE LIBERATION ARMY (SPLA) DI SUDAN

Separatist Movement Of Sudan's People Liberation Army (SPLA) In Sudan

Faishal Hardi Setyawan, Supriyadi

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jember

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: shalhardi@gmail.com supriyadi-fisipunej@ymail.com

Abstract

Separatist movement is a movement that aims to gain sovereignty and separate group of people or a region of a group or region that previously united (intact). The emergence of the idea of separatism could lead to a disintegration of the nation. Disintegration literally be understood as a nation split into parts that are mutually exclusive. Under these conditions the state has failed to protect and preserve the integrity of the nation. The disintegration of the nation as it also happened in the country of Sudan. Sudan in its history has undergone a national disintegration. Disintegration that occurs in Sudan due to the emergence of separatist movements Sudan's People Liberation Army (SPLA) in 1983. The SPLA separatist movement led by John Garang De Mabior as a form of resistance against the discontent toward discrimination conducted by the Central Government of Sudan. In its action, the SPLA also get support from outside parties, among which are Israel and the United States through Ethiopia. Since the founding of SPLA in 1983, Ethiopia has contributed a lot to the provision of arms and military training to members of the SPLA, thus affecting the dynamics of the civil war that occurred between northern Sudan and southern Sudan. The conflict between the Central Government of Sudan and the SPLA separatist movement finally brought to a stop after reaching agreement on Comprehensive Peace Agreement (CPA) in Naivasha, Kenya, in 2005.

Keywords: separatist, disintegration, Sudan's People Liberation Army, Sudan.

PENDAHULUAN

Sejak berakhirnya masa perang dunia kedua (PD II), hubungan internasional telah membawa dunia pada konstelasi baru dalam

hubungan antar negara. Dunia tidak lagi didominasi oleh pertentangan dua ideologi diantara Barat dan Timur. Isu-isu domestik yang sebelumnya memang telah ada, muncul kembali ke permukaan lingkungan politik internasional. Isu-isu

ini meliputi segala aspek kehidupan seperti pembangunan ekonomi, kerjasama, konflik etnis, perang sipil, dan bahkan berupa separatisme.

Situasi seperti konflik etnis, perang sipil, dan separatisme juga tampak di kawasan Afrika pada saat ini. Afrika merupakan salah satu kawasan yang terdiri dari banyak negara dan dihuni oleh masyarakat yang memiliki perbedaan dalam hal keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan kebudayaan. Selama beberapa dekade terakhir benua Afrika terus menerus mengalami kemiskinan, bencana kelaparan, perang, penyakit menular, bencana alam, pertikaian etnis, dan berbagai persoalan lainnya (Satrio, 2008: 1).

Pertikaian etnis juga terjadi di Sudan. Sudan adalah negara terbesar di Afrika yang berada di sebelah utara benua Afrika. Negara ini merdeka dari Inggris pada 1 Januari 1956. Sudan didominasi oleh dua kelompok besar masyarakat, yaitu masyarakat Arab dan masyarakat Afrika. Sudan juga memiliki jumlah suku yang sangat besar, tidak kurang dari 400 suku dengan bahasa yang berbeda satu sama lain (Reis, 2004). Seluruh suku ini berbaur di 26 negara bagian yang mempunyai otonomi yang cukup besar, karena Sudan menganut sistem pemerintahan federal (Diggle, 2005).

Secara garis besar, Sudan terbagi dalam dua bagian wilayah. Sudan bagian utara dihuni oleh ras Arab, berdarah Arab, dan berbahasa Arab. Selain itu, di Sudan bagian utara juga dihuni oleh ras non-Arab (suku Nubia) tetapi memeluk agama Islam dan dekat dengan ras Arab karena kesamaan

akidah, dan bahasa sehari-hari. Pengaruh Arab dan Islam juga sangat kuat dan mengakar di bagian Barat dan Timur Sudan. Sedangkan di Sudan bagian selatan, terdapat berbagai suku dari berbagai ras. Mereka mengaku sebagai penduduk asli Sudan dan Afrika, yang terdiri dari suku-suku Dinka, Nuer, Shiluk, dan Azande. Mayoritas dari mereka memeluk agama Kristen dan sebagian kecil tetap mempertahankan agama tradisi Afrika (Priambodo, 2011). Adanya perbedaan antara Sudan bagian utara yang Muslim Arab (kecuali Muslim Nubia) dengan Sudan bagian selatan yang non-Muslim, sering menimbulkan konflik kekerasan atau pergolakan yang menggoyahkan sendi-sendi pemerintahan di Pemerintah Pusat Sudan. Maka sejak merdeka tahun 1956, Sudan telah mengalami berkali-kali pergolakan, sebagai dampak dari kemelut antar kelompok yang berpengaruh terhadap stabilitas sosial, ekonomi, politik, dan keamanan (Pike, 2000).

Keadaan Sudan terbilang kacau karena perang sipil yang berlarut-larut selama sisa abad ke-20. Konflik tersebut berakar pada keadaan ekonomi, politik, dan dominasi sosial yang besar terhadap masyarakat non-Muslim dan non-Arab di Sudan bagian selatan. Pada akhirnya terjadi perang sipil. Perang sipil pertama dimulai pada tahun 1955 dan berakhir pada tahun 1972 yang ditandai dengan perjanjian Addis Ababa pada tanggal 27 Maret 1972.

Selanjutnya, perang sipil kedua pecah di Sudan pada tahun 1983 karena realisasi perjanjian Addis Ababa 1972 yang tidak sesuai harapan

masyarakat di Sudan bagian selatan. Kegagalan Perjanjian Addis Ababa ini telah memunculkan berdirinya gerakan separatis *Sudan's People Liberation Army* (SPLA; Tentara Pembebasan Rakyat Sudan) pimpinan John Garang De Mabior sebagai bentuk perlawanan atas ketidakpuasan terhadap tindakan diskriminasi Pemerintah Pusat Sudan. Dalam aksinya, SPLA banyak mendapatkan dukungan dari pihak luar, di antaranya adalah Israel dan Amerika Serikat melalui Ethiopia. Sejak berdirinya SPLA di tahun 1983, Ethiopia telah berkontribusi banyak terhadap penyediaan senjata dan pelatihan militer terhadap anggota SPLA, sehingga mempengaruhi dinamika peperangan sipil yang terjadi antara Sudan bagian utara dan selatan (Mokke, 2011:41). Gerakan separatis ini yang kemudian mengakibatkan terjadinya masalah kelaparan, lebih dari 4 juta jiwa mengungsi karena kehilangan tempat tinggal, dan korban tewas yang melebihi angka 2 juta jiwa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tulisan ini hendak menjelaskan tentang apa yang melatarbelakangi *Sudan's People Liberation Army* (SPLA) melakukan gerakan separatis di Sudan.

LANDASAN KONSEPTUAL

Gerakan separatis merupakan fenomena umum di beberapa negara (baru) yang tujuan utamanya ingin memisahkan diri dari negara yang sejak semula diperjuangkan dan dipatuhi bersama. Berbagai faktor yang melatarbelakangi separatisme adalah; i) Pemerintah pusat tidak memperhatikan pembangunan (ekonomi) di daerah tersebut. ii)

Penerapan hukum yang tidak adil (karena perbedaan ras dan adat istiadat). iii) Semangat kedaerahan (sukuisme) yang sangat kuat. iv) Adanya propaganda (intervensi asing) (Suharyo, 2010:37).

Seperti Negara Sudan, dimana merupakan sebuah negara yang di wilayahnya terdapat gerakan yang menjurus ke arah separatis. Gerakan tersebut bernama *Sudan's People Liberation Army* (SPLA). Gerakan SPLA merupakan sebuah bentuk upaya perlawanan untuk melepaskan diri dari wilayah pemerintah pusat Sudan. Gerakan ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah tindakan pemerintah pusat yang tidak memperhatikan pembangunan (ekonomi) dan ketidakadilan oleh pemerintah pusat terhadap hak-hak warga di Sudan bagian selatan. Dari segi politik dan ekonomi, Sudan bagian selatan sering tidak dianggap dalam keputusan politik, dan proliferasi ekonomi ke daerah tersebut pada akhirnya menyebabkan ketidaksetaraan lapangan pekerjaan dan perkembangan daerah. Sering pula terjadi eksploitasi di daerah Sudan bagian selatan oleh pemerintahan pusat yang berlokasi di Sudan bagian utara.

Faktor yang kedua adalah penerapan hukum yang tidak adil dan adanya diskriminasi ras dan agama oleh pemerintah pusat. Sudan bagian utara mayoritas ras Arab beragama Islam, sedangkan Sudan bagian selatan mayoritas ras Negro beragama Kristen. Presiden Sudan saat itu, Gaafar Nimeiry bermaksud mengabaikan perjanjian Addis Ababa dan berniat akan menjalankan peraturan berbasis Hukum Islam (hukum

syariah) sebagai peraturan nasional bagi seluruh wilayah Sudan. Keputusan Presiden Nimeiry tersebut langsung memicu kontroversi karena pemerintah pusat dianggap akan berlaku tidak adil terhadap Sudan bagian selatan yang mayoritas warganya non-Muslim (Kristen dan Animisme).

Faktor ketiga adalah timbulnya semangat kedaerahan (sukuisme) yang sangat kuat. Hal ini dipicu oleh rasa tidak terima atas pernyataan warga Sudan bagian utara yang mayoritas Arab dan Muslim yang menganggap bahwa warga Sudan di bagian utara lebih superior daripada warga Negro dan Kristen di Sudan bagian selatan. Karena pernyataan tersebut banyak warga Negro dan Kristen mendukung gerakan separatis SPLA pimpinan John Garang untuk mendirikan sebuah negara baru. Hal ini sekaligus menunjukkan pada warga Arab-Muslim di Sudan bagian utara bahwa warga Negro-Kristen di Sudan bagian selatan bisa hidup mandiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat Sudan di Khartoum.

Sedangkan faktor keempat adalah adanya campur tangan pihak asing dalam terjadinya separatisme di Sudan. Sejak berdirinya SPLA di tahun 1983, Israel dan Amerika Serikat melalui Ethiopia telah berkontribusi banyak terhadap penyediaan senjata militer di SPLA, sehingga mempengaruhi dinamika peperangan sipil yang terjadi antara Sudan bagian utara dan selatan. Selama peperangan terjadi, Ethiopia mengizinkan SPLA untuk bermarkas di Naru, dan memberikan kebebasan untuk melakukan perekrutan anggota pada warga Sudan yang mengungsi di Ethiopia.

Selain itu, dukungan pihak asing tersebut juga berupa pemberian persenjataan serta pelatihan militer kepada anggota SPLA (Dowden, 1994).

Beberapa faktor seperti pemerintah pusat yang tidak memperhatikan pembangunan ekonomi di wilayah Sudan bagian selatan, penerapan hukum yang tidak adil, timbulnya semangat kedaerahan di Sudan bagian selatan, dan adanya campur tangan pihak asing dalam terjadinya konflik sipil di Sudan ini yang kemudian memicu timbulnya gerakan separatis di Sudan bagian selatan. Gerakan separatis ini bernama *Sudan People's Liberation Army* (SPLA; Tentara Pembebasan Rakyat Sudan) yang didirikan pada tahun 1983 pimpinan John Garang de Mabior (Mokke, 2011:21). Dalam perjalanan konfliknya, Sudan dan SPLA telah membawa Sudan dalam perang saudara terpanjang di Afrika dengan jumlah korban tewas melebihi angka 2 juta jiwa.

HASIL PENELITIAN

1. Pemerintah Pusat Sudan Tidak Memperhatikan Pembangunan (Ekonomi) di Sudan Bagian Selatan

Kemerdekaan Sudan pada tahun 1956 memberikan harapan besar bagi rakyat Sudan bagian selatan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dari segi pendidikan, politik, ekonomi, serta perkembangan yang merata dan tidak hanya berfokus di daerah Sudan bagian utara. Namun, kemerdekaan menjadi ajang memperlebar jarak perkembangan antar kedua wilayah tersebut. Sudan bagian utara meneruskan kebijakan yang

sebelumnya diaplikasikan oleh penjajahan dari Inggris. Keuntungan monopoli kekuasaan politik yang dimiliki Pemerintahan pusat di Sudan bagian utara, mendorong mereka untuk menggunakan kewenangan dalam melakukan penyimpangan terhadap kesempatan pembangunan ekonomi di wilayah lain di Sudan. Pemerintah pusat terus menerus mengaplikasikan program pembangunan ekonomi regional secara tidak merata, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang tidak memberikan kesempatan kepada Sudan bagian selatan untuk berkembang. Kondisi tersebut telah mengakibatkan kesenjangan dan kemiskinan yang terjadi di daerah termarginalkan apabila dibandingkan dengan Sudan bagian utara yang beribukota di Khartoum. Kesenjangan yang terjadi di wilayah Sudan bagian selatan diperkuat dengan adanya bukti bahwa alokasi dana pembangunan di wilayah Negara Sudan tidak dibagi dengan merata.

Northern	121,3	368,5	763,8	823,6	1.402,4	659,6	4.139,2
Central	340,8	634,5	1.788,1	806,9	492,1	0	4062,4
Khartoum	4.351,4	6.477,3	11.461	13.355,5	3.313	5.740,6	44.698,8
Kordofan	14,6	122	265,2	302,1	164,6	175,2	1.043,7
Darfur	168,3	433,2	169,9	350,6	12,8	0	1.134,8
Eastern	614,1	741,5	580,1	1117	922,6	413,3	4.388,6
South Sudan	610,1	756,2	997,1	1.200	1.006	1.378,2	5.947,6

Perang sipil yang terjadi antara Pemerintah Pusat Sudan di utara dan gerakan separatis SPLA di Sudan bagian selatan, bukan semata-mata karena faktor historis adanya diskrimansi agama yang diwarisi dari pemerintahan kolonial. Namun, lambatnya pembangunan di daerah Sudan bagian selatan yang diakibatkan oleh minimnya alokasi dana pembangunan dalam sektor ekonomi di daerah tersebut. Daerah Sudan bagian utara merupakan wilayah yang memiliki alokasi dana pembangunan daerah tertinggi di Sudan. Dalam kurun waktu 1996-2001, wilayah utara dan Khartoum merupakan daerah dengan alokasi dana pembangunan terbesar, sangat jauh apabila dibandingkan dengan dana pembangunan daerah yang diterima Sudan bagian selatan yang memiliki sumberdaya alam melimpah. Kesenjangan pendapatan dari sumberdaya alam di Sudan bagian selatan telah memicu pemberontakan di wilayah tersebut yang dimotori oleh gerakan separatis

Tabel 1. Alokasi Dana Pembangunan Untuk Wilayah Negara Sudan Pada Tahun 1996-2001 (Dalam Juta Dinar) (Atemm, 2007).

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	Total Alokasi Dana

SPLA, yang menuntut persamaan hak dalam pembagian penghasilan dalam pembangunan ekonomi.

2. Semangat Kedaerahan (Sukuisme) Yang Sangat Kuat Di Sudan Bagian Selatan

Sudan merupakan negara terbesar di Afrika yang memiliki populasi lebih dari 41 juta jiwa dan terbagi menjadi beberapa kelompok etnis serta agama. Masyarakat Sudan terdiri lebih dari 100 etnis yang menetap maupun nomaden di wilayah Sudan, namun diklasifikasikan dalam Afrika kulit hitam (52%), Arab (39%), Beja dan Nubian (6%), dan lain-lain (3%). Sebagian besar kelompok etnis di Sudan menafsirkan tradisi dan asal-usul mereka mengacu pada peristiwa masa lampau. Sebagai contoh, orang-orang Berti dan Zaghawa mengklaim diri mereka keturunan suku Nilo-Sahara yang berasal dari barat laut Sudan. Namun, beberapa kelompok etnis yang hidup di Sudan juga merupakan imigran dari negara-negara tetangga Sudan yang terjadi puluhan tahun yang lalu (Wulandari, 2011:26). Populasi penduduk Sudan merupakan populasi yang paling berbeda dengan negara-negara lain di benua Afrika. Hal ini dikarenakan adanya dua kebudayaan besar yaitu Arab dan orang Afrika berkulit hitam, dengan ratusan kelompok etnis, suku dan bahasa. Sebagian besar masyarakat Sudan berbahasa Arab. Selain itu masih juga menggunakan bahasa suku mereka seperti Nubian, Beja, Ta Bedawie, Fur, Nuban, dan juga dialek Nilotic dan Nilo-Hamitic (Paglia, 2007).

Permulaan konflik di Sudan begitu kompleks tetapi bibit-bibit konflik telah dimulai sejak era kolonial ketika pemerintahan koloni Inggris memberikan kekuasaan pada Khartoum (Sudan bagian utara) untuk mengatur segala hal di negara kesatuan Sudan. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu dasar bagi munculnya gerakan separatis yang menuntut kemerdekaan dari kawasan Sudan bagian selatan. Pemerintahan yang dijalankan sangat didominasi oleh kaum Arab yang merupakan penduduk mayoritas di Sudan bagian utara, sedangkan kaum Negro Afrika di Sudan bagian selatan kurang mendapatkan tempat di politik dan Pemerintahan Sudan.

Perasaan diasingkan dan disisihkan oleh pemerintah pusat terhadap masyarakat Sudan selatan memicu terjadinya perang sipil pertama di negara Sudan. Konflik yang berlangsung selama dua dekade dan telah merenggut nyawa setidaknya setengah juta jiwa. Perang ini berakhir pada tahun 1972 melalui Perjanjian Addis Ababa, yang menjamin otonomi bagi wilayah Sudan bagian selatan. Kesepakatan damai akhirnya berakhir pada tahun 1983 ketika Gaafar Nimeiry berupaya mendeklarasikan Sudan sebagai negara Islam, akan menerapkan hukum syariah, berusaha menyingkahkan populasi non-Muslim di kawasan selatan Sudan, dan distribusi hasil minyak bumi yang lebih banyak menguntungkan pihak Pemerintah Pusat di Khartoum (Schepers, 2012).

Diskriminasi terhadap Negro-Kristen dan Animis di Sudan telah menjadi salah satu sebab terjadinya konflik yang paling lama di negara Afrika terbesar

saat itu (sebelum referendum Sudan bagian selatan 2011). Munculnya pernyataan bahwa Arab-Muslim lebih superior juga telah membuat banyak warga Negro-Kristen dan Animis yang mendukung gerakan separatis *Sudan People's Liberation Army* (SPLA) pimpinan John Garang untuk mendirikan sebuah negara baru dan lepas dari Pemerintah Sudan. Hal ini sekaligus menunjukkan pada warga Arab-Muslim di Sudan bagian utara bahwa warga Negro-Kristen di Sudan bagian selatan bisa hidup mandiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat Sudan di Khartoum.

Kesetaraan suku di Sudan bagian selatan pada saat itu, dimana tidak ada suku yang merasa lebih dominan karena sama-sama merupakan kaum Negro Afrika telah memunculkan rasa persatuan yang tinggi untuk segera terbebas dari belenggu Pemerintahan Arab di Khartoum. Kaum Negro yang berada di Sudan bagian selatan bahkan ikut ambil bagian dalam mendukung berdirinya SPLA dengan ikut masuk sebagai sukarelawan dalam militer. Selain itu tidak jarang pula kaum kulit hitam juga mengumpulkan bahan makanan sebagai konsumsi para pejuang dalam gerakan separatis SPLA (Aftergood, 2000).

		ini merupakan suku pertama yang mendukung berdirinya SPLA. Pendiri SPLA adalah salah satu masyarakat Dinka, yaitu John Garang.
2.	Nuer	Adalah kelompok suku terbesar kedua yang mewakili 15,6% populasi diseluruh Sudan bagian selatan. Salah satu orang penting dari masyarakat Nuer adalah Riek Machar yang saat itu menjadi salah satu orang kepercayaan John Garang di gerakan separatis SPLA.
3.	Shilluk	Merupakan suku animisme di Sudan bagian selatan yang sangat menentang diterapkannya Hukum Syariah oleh Pemerintah Pusat Sudan.
4.	Azande	Kelompok suku terbesar ketiga di wilayah Sudan bagian selatan yang memiliki kepercayaan Animisme dan Nasrani (setelah masuknya misionaris Kristen).
5.	Bari	Kelompok suku terbesar keempat di wilayah Sudan bagian selatan. Suku ini memiliki kepercayaan Animisme, namun di masa sekarang masyarakat suku ini lebih banyak memeluk Agama Nasrani.

Tabel 2. Suku-suku Di Sudan bagian selatan yang mendukung Gerakan Separatis *Sudan People's Liberation Army* SPLA (Buay, 2011).

No.	Nama Suku	Keterangan
1.	Dinka	Suku dinka adalah suku terbesar dengan jumlah populasi yang mewakili 35,8% populasi diseluruh wilayah Sudan bagian selatan. Suku

3. Adanya Propaganda (Intervensi Asing) Dalam Kekacauan Konflik Di Sudan

Terbaginya Sudan menjadi dua negara memang menjadi cerminan kegagalan elit politik negara Sudan untuk mempersatukan bangsanya yang multi etnik dan kepercayaan, serta kegagalan dalam menanamkan *sense of nation* ke dalam jiwa masyarakat bangsanya. Terpecahnya negara Sudan

juga bukan karena peran dari pihak Sudan bagian selatan dengan gerakan separatis *Sudan People's Liberation Army* (SPLA) saja, tetapi juga karena adanya intervensi asing (terutama Amerika Serikat dan Israel) yang ikut memperkeruh terjadinya konflik di Sudan.

Dalam konflik di Sudan, Amerika Serikat juga berperan dalam menginfiltrasi Sudan sejak awal tahun 1990-an. Peran Amerika Serikat melengkapi permainan Rezim Zionis Israel yang berupaya mengobrak-abrik pemerintahan Khartoum. Bahkan sejumlah pengamat politik meyakini bahwa penandatanganan nota kesepakatan perdamaian antara SPLA dan Khartoum tidak terlepas dari peran Amerika Serikat. Meski penandatanganan itu mengakhiri konflik antara kelompok milisi dan pemerintah Khartoum, namun langkah itu pada dasarnya merupakan bagian konspirasi Amerika Serikat dan Rezim Zionis Israel untuk menggapai ambisinya di Afrika. Bahkan Amerika Serikat berada di belakang desakan internasional untuk melakukan perjanjian damai dengan kelompok separatis bersenjata tersebut yang pada akhirnya nanti membuat Pemerintah Sudan menjadikan negaranya sebagai negara dengan dua negara bagian (Sudan Utara dan Sudan Selatan) setelah perjanjian *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) pada tahun 2005. Tujuannya tentu saja agar negara Sudan menjadi lemah sehingga kekayaan alamnya dapat dimanfaatkan oleh Amerika Serikat (Subagus, 2011).

Selain keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik separatis di Sudan dengan dukungannya terhadap *Sudan People's Liberation Army* (SPLA), Israel juga berada di belakang SPLA untuk menekan terpecahnya Pemerintahan Sudan. Dalam salah satu aksinya, Israel mengirimkan bantuan senjata melalui Ethiopia. Perlu diketahui, sejak berdirinya SPLA di tahun 1983, Ethiopia telah berkontribusi banyak terhadap penyediaan senjata militer di SPLA, sehingga mempengaruhi dinamika peperangan sipil yang terjadi antara Sudan Utara dan Selatan.

Dukungan Israel kepada kelompok separatis di Sudan bagian selatan telah dilakukan jauh sebelum SPLA terbentuk. Tabel berikut ini akan menampilkan tahap-tahap bantuan dari Israel kepada pihak pemberontak Sudan bagian selatan hingga berdirinya gerakan separatis SPLA yang mengakibatkan pecahnya Negara Sudan.

Tabel 3. Bantuan Israel Terhadap Gerakan Separatis Sudan People's Liberation Army (SPLA) (Huwaidi, 2011).

No.	Tahun	Jenis Bantuan
1.	1950an	- Bantuan kemanusiaan (obat-obatan, bahan-bahan, makanan, dokter). - Pelayanan kepada pengungsi perang sipil I yang kabur ke Ethiopia.

2.	1960an	<ul style="list-style-type: none"> - Mensuplai senjata terhadap pihak pemberontak di Sudan bagian selatan melalui wilayah Negara Uganda. - Pelatihan militer terhadap rakyat Sudan bagian selatan di wilayah Negara Ethiopia, Uganda, dan Kenya.
3.	1960-1970an	<ul style="list-style-type: none"> - Mensuplai senjata buatan Rusia melalui truk-truk kontainer dan pesawat kargo menuju lapangan markas gerakan separatis. - Mendirikan sekolah infanteri untuk mencetak pemimpin-pemimpin gerakan separatis.
4.	1970-1980an	<ul style="list-style-type: none"> - Melatih pasukan gerakan separatis SPLA dengan berbagai seni perang, termasuk pelatihan penggunaan pesawat tempur.
5.	1990an-CPA	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan militer dan politik dari pihak intelijen Israel kepada para pimpinan gerakan separatis SPLA. - Pengiriman senjata-senjata berat anti tank dan rudal anti pesawat.

Dukungan Israel terhadap pihak separatis *Sudan People's Liberation Army (SPLA)* dimulai pada tahun 1950-an, yaitu pada perang saudara sudan pertama. Pada masa itu, Israel masih berkonsentrasi pada bantuan kemanusiaan (obat-obatan, bahan makanan, dan dokter) kepada pengungsi perang yang kabur ke Ethiopia. Pada fase ini, Israel juga berusaha memperuncing konflik kesukuan dan menciptakan friksi antarsuku di Sudan.

Pada awal tahun 1960-an, Israel konsen dengan unsur-unsur militer rakyat dan melatihnya seni berperang di markas-markas khusus yang

dibangun di Ethiopia. Pada fase ini, pemerintah Israel memiliki keyakinan bahwa melibatkan Sudan dalam perang internal dengan pihak separatis dari Sudan bagian selatan sudah cukup merepotkan mereka daripada membantu Mesir dalam konflik dengan Israel (Perang Israel-Mesir tahun 1967) (Cody, 2006). Organisasi-organisasi misionaris dan bantuan kemanusiaan dari Barat juga melakukan aktivitas di Sudan bagian selatan, sehingga hal ini cukup menarik minat Israel untuk ikut menyusupkan intelijennya ke daerah Sudan bagian selatan dibawah naungan lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan tersebut. Target utama dari intelijen Israel adalah menggalang kelompok-kelompok yang berpengaruh di masyarakat untuk dilatih melanggengkan ketegangan. Pada fase ini juga Israel sengaja memperluas jaringan dukungannya kepada kelompok separatis dengan mensuplai senjata kepada mereka melalui wilayah Uganda. Perjanjian pertama untuk pengiriman senjata diteken tahun 1962, sebagian besar adalah senjata-senjata ringan buatan Rusia yang diperoleh Israel dari sisa-sisa rampasan perang dengan Mesir tahun 1956 (Murphy, 2008). Aksi-aksi pelatihan pasukan separatis Sudan bagian selatan juga terus berlangsung di Uganda, Ethiopia dan Kenya.

Tahap ketiga dalam proses bantuan dari Israel terhadap gerakan separatis di Sudan bagian selatan dimulai dari pertengahan tahun 1960-an hingga 1970-an. Dalam fase ini suplai senjata menuju gerakan separatis di Selatan terus berdatangan melalui pihak intelijen Israel. pihak intelijen Israel mengirimkan truk-truk kontener

berisikan senjata buatan Rusia kepada kelompok separatis di Sudan bagian selatan yang mereka peroleh dari rampasan perang dengan Mesir tahun 1967. Pesawat-pesawat kargo Israel menjatuhkan senjata dan alat-alatnya itu ke lapangan markas separatis di daerah Sudan bagian selatan.

Tahap keempat dimulai pada akhir 1970-an hingga awal tahun 1980-an. Bantuan dan dukungan Israel bagi kelompok separatis semakin bertambah setelah Ethiopia menjadi perlintasan terorganisir untuk suplai senjata ke Sudan bagian selatan. Pada fase ini muncul sosok John Garang sebagai pemimpin yang didukung penuh oleh Israel. Pihak separatis SPLA pimpinan John Garang dibekali dana serta senjata dan pelatihan berbagai seni perang oleh militer Israel. Di antara mereka yang dilatih adalah para pilot untuk menggunakan pesawat-pesawat tempur.

Tahap Kelima dimulai awal tahun 1990 dan di fase ini dukungan Israel terus berlanjut dan diperluas jangkauannya. Truk-truk kontainer mulai masuk ke Sudan bagian selatan melalui Kenya dan Ethiopia. Pihak Israel membekali orang-orang selatan dengan senjata-senjata berat anti tank dan rudal anti pesawat. Pada awal tahun 1993 koordinasi antara pihak militer Israel dengan pihak separatis SPLA pimpinan John Garang telah mencakup berbagai sektor, baik yang berkenaan dengan pendanaan, pelatihan, persenjataan, informasi atau mengawasi pelatih-pelatih Israel dalam mempersiapkan aksi-aksi militer.

Peran Israel dalam konflik internal di Sudan dianggap penting karena Israel juga ingin

mencegah penyebaran atau meluasnya pengaruh Islam di Afrika. Perhatian Israel untuk melemahkan Sudan dengan menyulut api perang di Sudan bagian selatan dan melemahkan kaum Muslimin di Ethiopia, Eritrea, dan negara-negara lain di Afrika, adalah untuk menciptakan pengaruhnya demi tujuan menguasai kawasan sungai Nil, Laut Merah, dan menghalangi kebangkitan Islam di wilayah Sudan.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang ditemukan dalam penulisan karya ilmiah diatas, latar belakang *Sudan's People Liberations Army* (SPLA) dalam melakukan gerakan separatis di Sudan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah alokasi dan pembangunan yang tidak merata dan cenderung terpusat di wilayah Sudan bagian utara. Perang sipil yang terjadi antara Pemerintah Pusat Sudan di utara dan gerakan separatis SPLA di Sudan bagian selatan, bukan semata-mata karena faktor historis adanya diskrimansi agama yang diwarisi dari pemerintahan kolonial Inggris. Namun, lambatnya pembangunan di daerah Sudan bagian selatan yang diakibatkan oleh minimnya alokasi dana pembangunan dalam sektor ekonomi di daerah tersebut. Daerah Sudan bagian utara merupakan wilayah yang mendapatkan alokasi dana pembangunan daerah tertinggi di Sudan. Keuntungan monopoli kekuasaan politik yang dimiliki Pemerintahan pusat di Sudan bagian utara, mendorong mereka untuk menggunakan kewenangan dalam melakukan penyimpangan

terhadap kesempatan pembangunan ekonomi di wilayah lain di Sudan. Ketidakadilan dalam pembangunan ekonomi ini yang kemudian menjadi salah satu dasar bagi munculnya gerakan separatis SPLA yang menuntut kemerdekaan dari wilayah Sudan bagian selatan.

Faktor yang kedua adalah diskriminasi terhadap Negro-Kristen dan Animis di Sudan. Diskriminasi oleh pemerintah pusat terhadap Negro-Kristen dan Animis telah menjadi salah satu sebab terjadinya konflik yang paling lama di negara Afrika terbesar saat itu (sebelum referendum Sudan bagian selatan 2011). Munculnya pernyataan bahwa Arab-Muslim lebih superior juga telah membuat banyak warga Negro-Kristen dan Animis yang mendukung gerakan separatis *Sudan People's Liberation Army* (SPLA) pimpinan John Garang untuk mendirikan sebuah negara baru dan lepas dari Pemerintah Sudan. Hal ini sekaligus menunjukkan pada warga Arab-Muslim di Sudan bagian utara bahwa warga Negro-Kristen di Sudan bagian selatan bisa hidup mandiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat Sudan di Khartoum. Semangat persatuan antarsuku yang tinggi menjadi modal berharga pergerakan suku-suku di Sudan bagian selatan untuk segera terbebas dari belenggu Pemerintahan Arab di Khartoum. Kaum Negro yang berada di Sudan bagian selatan bahkan ikut ambil bagian dalam mendukung berdirinya SPLA dengan ikut masuk sebagai sukarelawan dalam militer.

Faktor yang ketiga adalah adanya campur tangan negara lain dalam terjadinya perang sipil

kedua di Sudan. Negara seperti Israel dan Amerika Serikat telah menjadi donatur pihak SPLA dalam bantuan senjata hingga pelatihan militer. Kekayaan sumberdaya alam minyak bumi di Sudan bagian selatan menjadi perhatian tersendiri bagi Amerika Serikat. Namun, kepentingan nasional Amerika Serikat terhadap konflik di Sudan lebih dari sekedar kepentingan ekonomi akan sumber daya alam potensial dari Sudan, tetapi juga kepentingan politik dan sosial yang berorientasi jangka panjang. Apabila kekayaan alam di Sudan bagian selatan mampu dikelola dengan baik dan dikuasai penuh oleh umat Islam, tentu akan menjadi modal penting bagi tumbuhnya kekuatan Pemerintah pusat Sudan sehingga berpotensi mengancam kepentingan Amerika Serikat dan Israel di kawasan Afrika. Sudan adalah negara kunci Islam di benua Afrika dan juga berdaulat di sebagian laut Merah. Sudan bisa menebarkan pengaruh Islam di negara-negara sekitar. Selain itu, Sudan yang juga berdampingan dengan Sungai Nil yang tentunya menjadi incaran Zionis Israel yang memimpikan Israel Raya hingga Eufrat. Peran Israel dalam konflik internal di Sudan dianggap penting karena Israel ingin mencegah penyebaran atau meluasnya pengaruh Islam di Afrika. Perhatian Israel untuk melemahkan Sudan yaitu dengan menyulut api perang di Sudan bagian selatan adalah untuk menciptakan pengaruhnya demi tujuan menguasai kawasan sungai Nil, Laut Merah, dan menghalangi kebangkitan Islam di wilayah Sudan.

Perang sipil kedua di Sudan resmi berakhir pada tahun 2005. Berakhirnya perang sipil ini

ditandai dengan lahirnya kesepakatan damai *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) pada tahun 2005 antara Pemerintah Pusat Sudan dengan *Sudan's People Liberations Army* (SPLA). Sudan bagian selatan akhirnya resmi merdeka menjadi Republik Sudan Selatan pada tahun 2011 melalui sebuah referendum yang merupakan hasil dari kesepakatan CPA pada tahun 2005.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Suharyo, dkk. 2010. *Interaksi Hukum Nasional dan Internasional Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Separatisme di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sumber E-Book:

Atemm, Eltigani Seisi M. 2007. *The Root Causes Of Conflicts In Sudan And The Making Of The Darfur Tragedy*. http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/5425~v~The_root_causes_of_conflicts_in_Sudan_and_the_makink_of_the_Darfur_tragedy.pdf. [4 Maret 2015]

Paglia, Pamela. 2007. *Ethnicity and Tribalism: are these the Root Causes of the Sudanese Civil Conflicts?*. <http://www.africaeconomicanalysis.org/articles/pdf/sudan0807.pdf>. [10 Oktober 2013]

Sumber Skripsi:

Mokke, Nolly Prapti M. 2011. *Suatu Analisis Tentang Masa Depan Negara Sudan Pasca Referendum*. Makassar: FISIP Universitas Hasanuddin

Satrio, Adhi. 2008. *Peran Pasukan Perdamaian PBB Dalam Konflik Internal Di Sierra Leone (1994-2005)*. Jakarta: FISIP UI.

Wulandari, Kartika. 2011. *Implikasi Pemilu Sudan Tahun 2010 Terhadap Legitimasi Pemerintahan Omar Hassan Al-Bashir*. Jember: FISIP Universitas Jember.

Sumber Internet:

Aftergood, Steven. 2000. *Sudan's People Liberation Army/Movement*. <http://www.fas.org/irp/world/para/spla.htm>. [5Juli 2013]

Buay, Gordon. 2011. *The Implementation Of Dinka Domination In South Sudan*. <http://www.southsudan.net/theimp.html>. [17 Nopember 2014]

Cody, Michael. 2006. *1967: Israel Launches Attack On Egypt*. http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/june/5/newsid_2654000/2654251.stm. [27 Juli 2014]

Diggle, John. 2005. *History Of The Sudan*. <http://www.historyworld.net/wrldhis/plaintexthistories.asp?historyid=aa86>. [15 April 2013]

Dowden, Richard. 1994. *Israeli Weapons 'Bound For Rebels' In Southern Sudan: Arms May Be Destined For SPLA Fight Against Khartoum*. <http://www.independent.co.uk/news/world/israeli-weapons-bound-for-rebels-in-southern-sudan-arms-may-be-destined-for-spla-fight-against-khartoum-1430077.html>. [25 Maret 2013]

Huwaidi, Fahmi. 2011. *South Sudan Separation Affair*. <http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2011/1/10/-إسراءثليونيروونقصة-الانفصال>. [7 Desember 2014]

Murphy, Alex. 2008. *A History Of Israel*.

<http://www.historycentral.com/Israel/1967>

[SixDayWar.html](http://www.historycentral.com/Israel/1967/SixDayWar.html). [16 Juni 2014]

Pike, John. 2000. *Sudan Civil War*.

<http://www.globalsecurity.org/military/world/war/sudan.htm>.

[5 Februari 2013]

Priambodo, Ahmad. 2011. Kebijakan Luar Negeri Sudan Terhadap Ketidakstabilan Politik di Sudan.

<http://dc341.4shared.com/doc/7y2orYyD/p>

[review.html](http://dc341.4shared.com/doc/7y2orYyD/p). [2 Februari 2013]

Schepers, Emile. 2012. *Oil in the balance in Sudan-South Sudan war*.

<http://www.peoplesworld.org/oil-in-the-balance-in-sudan-south-sudan-war/>.

[12 Oktober 2014]

Subagus, Deni. 2011. Dunia Akui Sudan Selatan.

<http://health.kompas.com/read/2011/07/11/04082913/Dunia.Akui.Sudan.Selatan>.

[2 Februari 2014]

